

Kampus Merdeka
di Perguruan Tinggi

Islam Negeri

◆ PENULIS

Achmad Muhaddam Fahham
Elga Andina
Fieka Nurul Arifa
Yulia Indahri

◆ PENYUNTING

Dr. Deni Kamaludin Yusup, M.A.

**KAMPUS MERDEKA
DI
PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM NEGERI**

Penyunting:

Dr. Deni Kamaludin Yusup, M.A.

Penulis:

Achmad Muchaddam Fahham

Elga Andina

Fieka Nurul Arifa

Yulia Indahri

Judul:

Kampus Merdeka di
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri

Perpustakaan Nasional:

Katalog Dalam Terbitan (KDT)
xi+99 hlm; 14,5x21 cm
ISBN: 978-623-6716-08-3
Cetakan Pertama, 2021

Penulis:

Achmad Muchaddam Fahham
Elga Andina
Fieka Nurul Arifa
Yulia Indahri

Penyunting

Dr. Deni Kamaludin Yusup, M.A.

Pemeriksa Naskah Cetak

Kisno Umbar

Desain Sampul:

Fajar Wahyudi

Tata Letak:

Yulia Indahri

Diterbitkan oleh:

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
Gedung Nusantara I Lt. 2
Jl. Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270
Telp. (021) 5715409 Fax. (021) 5715245

Bekerja Sama dengan:

Intrans Publishing, Anggota IKAPI Jawa Timur
Wisma Kalimetro Jl. Joyosuko Metro No 42 Merjosari
Malang, Jawa Timur, Indonesia
Telp. (0341) 573650 Fax. (0341) 588010
redaksi.intrans@gmail.com
<http://intranspublishing.com>

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau izin pencipta atau pemegang hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000.000 (empat miliar rupiah).

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan segala rahmat dan karunia-Nya pada para peneliti di Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal DPR RI, sehingga tim peneliti bidang Kesejahteraan Sosial dapat menyelesaikan penulisan buku yang berjudul “Kampus Merdeka di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri”.

Buku ini terbit sebagai hasil dari kajian mengenai kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang diluncurkan pemerintah sejak awal 2020. Kajian ini menarik, karena dapat digunakan sebagai pemantik diskusi mengenai pendidikan tinggi secara umum di Komisi X, dan juga pendidikan tinggi keagamaan di Komisi VIII. Penulis memahami bahwa perguruan tinggi keagamaan memiliki dua mandat untuk mengembangkan rumpun ilmu. Rumpun ilmu pertama adalah ilmu agama, dan rumpun kedua adalah ilmu humaniora, sosial, alam, dan terapan. Pengembangan rumpun ilmu keagamaan berada di bawah naungan Kementerian Agama sementara untuk rumpun ilmu humaniora, sosial, alam, dan terapan di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Penelitian yang dilakukan Tim Peneliti dan menjadi bagian terbesar dari buku ini berjudul “Respons PTKIN terhadap Kebijakan Kampus Merdeka-Merdeka Belajar: Studi Kasus UIN Bandung dan UIN Banten”. Penelitian dilakukan oleh keempat peneliti yaitu Dr. Achmad Muhaddam F., S.Ag., M.A., Elga Andina, S.Psi., M. Psi., Fieka Nurul Arifa, M.Pd., dan Yulia Indahri, S.Pd., M.A., dengan bidang kepakaran yang berbeda-beda.

Buku ini mengulas berbagai hal mengenai upaya UIN Bandung dan UIN Banten dalam merespons kebijakan Kampus Merdeka Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kampus

Merdeka disambut baik oleh UIN Bandung dan UIN Banten. Akan tetapi sambutan kedua UIN ini berbeda. UIN Bandung menyambut dengan menyusun pedoman teknis penyelenggaraan Kampus Merdeka melalui Surat Keputusan Rektor UIN Bandung. Pedoman tersebut selanjutnya menjadi rujukan bersama civitas akademika UIN Bandung dalam melaksanakan kebijakan Kampus Merdeka, mulai dari tingkat fakultas hingga program studi (prodi). Sementara UIN Banten meskipun menyambut baik kebijakan tersebut, hingga penelitian yang dilakukan selesai dilaporkan, belum menyusun pedoman teknis pelaksanaan kebijakan Kampus Merdeka. Akibatnya fakultas dan prodi belum memiliki rujukan yang baku untuk melaksanakan kebijakan Kampus Merdeka.

Saya berharap hasil penelitian dan kajian literatur yang telah disusun di buku ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam perumusan kebijakan pendidikan tinggi secara umum, dan pendidikan tinggi keagamaan Islam secara khusus. Apalagi saat ini sudah ada kesamaan pemahaman dari Pemerintah dan DPR RI bahwa sistem pendidikan nasional perlu diubah untuk menyesuaikan dengan tuntutan perubahan yang merupakan keniscayaan.

Pada kesempatan yang baik ini, saya sampaikan apresiasi yang mendalam untuk para penulis yang secara inovatif dan konstruktif telah berusaha menuangkan hasil pemikiran mereka yang terbaik bagi pembangunan masyarakat dan bangsanya. Buku ini sangat layak dibaca para pengambil kebijakan pendidikan dan para pemerhati pendidikan untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Selamat membaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, September 2021
Kepala Pusat Penelitian
Sekretariat Jenderal DPR RI

Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si.

Prolog

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Indikator kemajuan suatu bangsa salah satunya dapat diukur dengan tingginya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam arti sumber daya manusia yang dari segi kuantitas dan kualitas tinggi. Pada tahun 1990, *United Nations Development Programme* (UNDP) membangun indeks ini untuk menekankan pentingnya manusia beserta sumber daya yang dimilikinya dalam pembangunan. Indeks ini terbentuk dari rata-rata skor pencapaian tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat IPM Indonesia pada tahun 2020 berada di posisi 70,94. Ada kenaikan sebesar 0,02 poin dibandingkan tahun 2019 yang berada di posisi 70,92. Angka IPM yang berada di rentang 70–80 mengindikasikan bahwa skornya tinggi. Dengan kata lain, pada tahun 2020 Indonesia menduduki peringkat ke 107 dari 189 negara yang dianalisis oleh UNDP, di mana Indonesia masih berada di peringkat tengah, meskipun jika merujuk kepada skor IPM RI versi UNDP, maka statusnya tergolong tinggi. Namun jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, Indonesia masih menduduki peringkat kelima dan masih kalah dari Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand.

Terlebih lagi apabila memperhatikan kondisi terkini, sejak tahun 2020 pertumbuhan IPM di tingkat nasional dan daerah menghadapi tantangan dengan tumbuh melambat akibat pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan sebagian besar negara di dunia. Perlambatan pertumbuhan IPM umumnya disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan umur harapan hidup dan pendidikan,

serta menurunnya pengeluaran riil per kapita sebagai akibat dari kontraksi pertumbuhan ekonomi.

Hal tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk melakukan percepatan peningkatan IPM melalui reformasi sistem pendidikan nasional. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Nadiem Makarim, melakukan terobosan baru yang bagi saya bisa dibilang *“Snowball Progressive Policy”*, yakni menerapkan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi.

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tersebut menuntut setiap perguruan tinggi (PT) agar menyiapkan civitas akademiknya mampu menghadapi tuntutan perubahan sosial, budaya, teknologi, dan dunia kerja yang demikian pesat. Ruh kebijakan tersebut yang sangat terasa dalam kebijakan MBKM meliputi empat kebijakan utama, yaitu: (1) Kemudahan pembukaan program studi baru; (2) Perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi; (3) Kemudahan perguruan tinggi menjadi badan hukum; dan (4) Hak belajar tiga semester di luar program studi (prodi). Mahasiswa juga diberikan kebebasan untuk mengambil SKS di luar prodi, tiga semester yang dimaksud dapat diambil untuk pembelajaran di luar prodi dalam PT dan atau pembelajaran di luar PT.

Kalangan PT keagamaan Islam negeri (PTKIN) tentu saja sangat menyambut positif kebijakan ini, karena program MBKM memberikan kebebasan dan ruang yang sangat luas bagi seluruh civitas akademika, khususnya dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan setiap program akademik dan non-akademik yang berorientasi kepada peningkatan mutu lulusan yang unggul dan kompetitif, memiliki kualifikasi dan kompetensi akademik yang tinggi sesuai di bidang keahliannya, serta memiliki kemandirian, profesionalisme, dan berdaya saing sesuai kebutuhan pengguna (*stakeholders*).

Hal inilah yang kemudian menarik bagi tim peneliti Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, untuk mengangkat penerapan MBKM di PTKIN menjadi sebuah penelitian yang kini telah disajikan menjadi sebuah buku yang sangat lengkap bertajuk “Respons PTKIN terhadap Kebijakan Kampus Merdeka-Merdeka Belajar: Studi Kasus UIN Bandung dan UIN Banten”. Saya sangat mengapresiasi dan menyambut gembira, buku hasil penelitian yang dilakukan empat peneliti DPR RI yaitu Dr. A. Muhaddam Fahham, S.Ag., M.A., Elga Andina, S.Psi., M. Psi., Fieka Nurul Arifa, M.Pd., dan Yulia Indahri, S.Pd., M.A., dengan bidang kepakaran yang berbeda-beda akhirnya selesai.

Dalam buku ini disajikan paparan secara komprehensif tentang bagaimana respons PT yang menyambut positif kebijakan penerapan MBKM di PTKIN melalui studi perbandingan di UIN Bandung dan UIN Banten. Buku ini juga telah memaparkan secara sistematis dan lengkap mengenai tahapan-tahapan MBKM di PTKIN, mulai dari penyusunan peraturan universitas dalam bentuk panduan atau petunjuk teknis, peninjauan kurikulum melalui *workshop*, penyusunan rencana pembelajaran, mekanisme/proses pembelajaran dan praktikum, bimbingan dan supervisi, hingga evaluasinya.

Buku yang ada di hadapan pembaca yang budiman ini juga dapat menjadi sebuah “potret” bagi khalayak untuk melihat lebih detail tentang penerapan MBKM di PTKIN. Dalam buku ini terlihat bagaimana upaya PTKIN memberikan “hak belajar tiga semester di luar program studi”, meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian, serta memberikan program-program *experiential learning* dengan jalur yang fleksibel yang diharapkan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan *passion* dan bakatnya.

Seperti halnya para penulis yang telah dengan susah payah menyusun buku ini, saya juga berharap buku hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam perumusan

kebijakan pendidikan tinggi pada umumnya, dan pendidikan tinggi keagamaan Islam pada khususnya. Apalagi saat ini sudah ada kesamaan pemahaman dari Pemerintah dan juga DPR RI bahwa sistem pendidikan nasional perlu diubah untuk menyesuaikan dengan tuntutan perubahan yang merupakan keniscayaan. Saya sepakat dengan quote dari Nelson Mandela, *“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world in the future”*.

Pada akhirnya, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para penulis yang telah dengan susah payah bekerja keras secara inovatif dan konstruktif menyusun buku ini. Buku ini sangat layak dibaca para pengambil kebijakan pendidikan dan para pemerhati pendidikan untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Semoga buah pena hasil pemikiran mereka yang terbaik ini dapat memberikan banyak kontribusi dan manfaat untuk kemajuan pembangunan masyarakat Indonesia.

Aamiin Yaa Robbal ‘Alamiin...

Alhamdulillahirabbil ‘Alamin.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, September 2021
Penyunting

Dr. Deni Kamaludin Yusup, M.A.

Daftar Isi

Kampus Merdeka di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri

Kata Pengantar.....	iii
Prolog	v
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Bagan	xi

Bab I Pendahuluan

I.1. Permasalahan.....	3
I.2. Sistematika Buku.....	4
I.3. Tujuan Penulisan.....	5

Bab II Merdeka Belajar - Kampus Merdeka

2.1. Pembukaan Program Studi Baru.....	10
2.2. Akreditasi dan Reakreditasi.....	12
2.3. Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH).....	15
2.4. Hak Belajar Mahasiswa.....	16

Bab III**Kampus Merdeka di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri**

3.1. Persiapan Awal.....	24
3.2. Bentuk Kegiatan Kampus Merdeka UIN Bandung.....	27
3.3. Kampus Merdeka di UIN Banten.....	71

Bab IV

Penutup	79
----------------------	----

Epilog	81
--------------	----

Daftar Rujukan	85
----------------------	----

Biografi Penulis	89
------------------------	----

Biografi Penyunting	91
---------------------------	----

Indeks	93
--------------	----

Daftar Tabel

Tabel 1.	Target 15 Tahun Pendidikan Tinggi.....	3
Tabel 2.	Lembaga Akreditasi yang Terdaftar dalam Persetujuan Internasional	14
Tabel 3.	Contoh Kegiatan Kampus Merdeka	18

Daftar Bagan

Bagan 1.	Alokasi Anggaran Kegiatan Kampus Merdeka	9
Bagan 2.	Tahapan Perencanaan Program Kampus Merdeka UIN Bandung.....	25
Bagan 3.	Tahapan Implementasi Program Kampus Merdeka UIN Bandung.....	26
Bagan 4.	Proses Pertukaran Pelajar.....	29
Bagan 5.	Proses Magang	38
Bagan 6.	Proses Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan.....	45
Bagan 7.	Proses Penelitian/Riset	48
Bagan 8.	Proses Proyek Kemanusiaan	51
Bagan 9.	Proses Kegiatan Wirausaha.....	55
Bagan 10.	Proses Studi Independen	59
Bagan 11.	Proses Kuliah Kerja Nyata Tematik.....	65
Bagan 12.	Contoh Model KKN Tematik yang Diperpanjang.....	68
Bagan 13.	Contoh Model KKN Tematik Mengajar di Desa	69
Bagan 14.	Contoh Model KKN Tematik <i>Free Form</i>	70

Epilog

Diskusi dengan UIN Bandung dan UIN Banten memperlihatkan bahwa terdapat gap yang cukup jauh antara kedua PTKIN dalam menyikapi kebijakan Kampus Merdeka. Untuk UIN Bandung yang tergolong lebih cepat, tercatat ada lima hambatan yang menjadi kendala pelaksanaan Kampus Merdeka. *Pertama*, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang relevan. *Kedua*, keterbatasan sarana dan prasarana kegiatan akademik (pembelajaran) dan non-akademik (penunjang). *Ketiga*, keterbatasan sistem jaringan (*networking-system*) untuk membangun kemitraan inter- dan antar-lembaga. *Keempat*, keterbatasan anggaran pada setiap PTKIN untuk mengimplementasikan Kampus Merdeka. *Kelima*, belum dilaksanakannya kebijakan otonomi PT dengan semua dimensinya.

Sedangkan di UIN Banten, tantangan pelaksanaan Kampus Merdeka terlihat dari mekanisme pembukaan prodi baru, sistem akreditasi PT, dampak perubahan menjadi PTN-BH, dan juga kegiatan bagi mahasiswa, yang semuanya merupakan program unggulan dari Kampus Merdeka.

Berbagai hambatan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi PTKIN. UIN Bandung tetap berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan Kampus Merdeka dengan berbagai upaya, seperti *pertama*, mengembangkan kurikulum dan pembelajaran secara inter- dan antar-lembaga, dan multidisipliner pada setiap fakultas, jurusan, dan prodi. *Kedua*, menambah kelengkapan jumlah SDM tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan institusi. *Ketiga*, menyediakan sarana dan prasarana kegiatan akademik (pembelajaran) dan non-akademik (penunjang) sesuai dengan kemampuan anggaran. *Keempat*, perluasan sistem jaringan (*networking-system*) dan membangun berbagai kemitraan inter- dan antar-lembaga melalui MoU (tingkat

universitas) dan MoI (tingkat fakultas/jurusan/prodi). *Kelima*, meningkatkan kemampuan anggaran di UIN Bandung melalui Optimalisasi Pusat Bisnis dan pendapatan BLU UIN Bandung, dan sumber lain yang halal baik melalui hibah murni dan kemitraan. *Keenam*, menerapkan kebijakan otonomi PT dengan semua dimensinya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing institusi yang ada pada UIN Bandung, baik pada tingkat universitas, jurusan maupun prodi.

UIN Banten mencoba memulai kebijakan Kampus Merdeka dengan melibatkan tokoh dan pakar pendidikan. Hasil *webinar* dengan beberapa tokoh dan praktisi pendidikan tinggi menjadi kertas kerja awal yang cukup operasional untuk diterapkan. UIN Banten meyakini bahwa upaya mengembangkan PT ke arah yang lebih baik, seperti hanya kebijakan Kampus Merdeka, dimulai dengan niat baik bahwa pendidikan tinggi milik bersama dan didiskusikan kemajuannya bersama-sama.

Sebagai awal melangkah, UIN Banten mengingatkan bahwa pemimpin PTKIN perlu mempraktikkan tujuh prinsip dasar dari tata kelola kelembagaan (*good governance*). *Pertama*, prinsip akuntabilitas, yaitu meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat baik dosen maupun mahasiswa. *Kedua*, pengawasan, yakni meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan tata kelola kelembagaan di Fakultas Syariah dengan melibatkan para pihak baik swasta dan masyarakat luas (dosen dan mahasiswa).

Ketiga, daya tanggap artinya meningkatkan kepekaan para penyelenggaraan pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat (dosen dan mahasiswa) tanpa memihak kepada kepentingan tertentu. *Keempat*, profesionalisme yaitu meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan kelembagaan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau. *Kelima*, efisiensi dan efektivitas, yang menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.

Keenam, transparansi yaitu menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pimpinan dan dosen atau pimpinan dan mahasiswa melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang terkait dengan urusan kelembagaan. Dan terakhir, *ketujuh*, partisipasi, yaitu mendorong setiap warga (dosen/mahasiswa) untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan dosen, staf dan mahasiswa, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Daftar Rujukan

- Arifin, S., & Muslim, M. (2020). Tantangan Implementasi Kebijakan “Merdeka Belajar, Kampus Merdeka” pada Perguruan Tinggi Islam Swasta di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam al-Ilmi*, 3(1), 4.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (2020). *Buku Saku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI.
- Dukung Kampus Merdeka, UIN Banten Tingkatkan Kualitas Dosen. (2020, Maret 12). *Digdayamedia.id*. Retrieved from <https://digdayamedia.id/dukung-kampus-merdeka-uin-banten-tingkatkan-kualitas-dosen/>
- Effendi, S. (2003). Pengelolaan Perguruan Tinggi menghadapi Tantangan Global. *Makalah Seminar Nasional Majelis Rektor Indonesia*, Makassar, 31 Januari–2 Februari 2003.
- Ghozali, I. (2018). Educational Challenges to the 4.0 Industrial Revolution: Experience from Indonesia. *Makalah The International Academi Seminar*, Thepsatri Rajabaht University, Thailand, 28 Februari 2018.
- Ihsan, D. (2021, Juni 28). Daftar 8 PTKIN Masuk Jajaran Universitas Terbaik di Indonesia. *Kompas.com*. Retrieved from <https://www.kompas.com/edu/read/2021/06/28/210847671/daftar-8-ptkin-masuk-jajaran-universitas-terbaik-di-indonesia?page=all>.
- Indriani. (2021, Mei 3). Kemendikbudristek anggarkan dana Rp1 triliun untuk Kampus Merdeka. *Antaraneews.com*. Retrieved from https://www.antaraneews.com/berita/2135394/kemendikbudristek-anggarkan-dana-rp1-triliun-untuk-kampus-merdeka?utm_medium=mobile.
- Kemendikbud (2021). *Paparan Peta Jalan Pendidikan Ditjen Pendidikan Tinggi 2021–2024*. RDPU Komisi X DPR RI,

- Jakarta, 4 Januari 2021.
- Kemendikbud. (2020a). *Paparan* Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI, Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kemendikbud Tahun Anggaran 2021, Jakarta, 23 September 2020.
- Kemendikbud. (2020b). *Paparan* Merdeka Belajar: Kampus Merdeka. Raker Komisi X DPR RI, Jakarta, 24 Januari 2020.
- Mediana. (2021a, 21 Januari). Belum Semua Perguruan Tinggi Jalankan Konsep Kampus Merdeka. *Kompas.id*. Retrieved from <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/01/21/belum-semua-perguruan-tinggi-jalankan-konsep-kampus-merdeka>.
- Napitupulu, E. L. (2021, Mei 11). Melalui Program IIMSA, Mahasiswa Dapat Belajar di Luar Negeri Satu hingga Dua Semester. *Kompas.id*. Retrieved from <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/05/11/melalui-program-isma-mahasiswa-dapat-belajar-di-luar-negeri-satu-hingga-dua-semester/>
- Prasetyo, H., & Soetopo, W. (2018). Industri 4.0: Telaah Klasifikasi Aspek dan Arah Perkembangan Riset. *J@ti Undip: Jurnal Teknik Industri*, 3(1), 17–26.
- Sarbiran. (1997). Menerawang Perguruan Tinggi di Era Globalisasi. *Cakrawala Pendidikan*, 1(XI), 1–10.
- Siregar, N., Sahirah, R., & Harahap, A. A. (2020). Konsep Kampus Merdeka Belajar di Era Revolusi Industri 4.0. *Fitrah: Journal of Islamic Education*, 1(1), 141–157.
- UIN Sunan Gunung Djati Bandung. (2020). *Petunjuk Teknis Implementasi Kampus Merdeka di UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- UIN Sunan Gunung Djati Bandung. (2021). *Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Wawancara Dudang Gojali, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Bandung, 24 September 2020.
- Wawancara, Deni Kamaluddin Yusuf, Wakil Dekan I Fakultas Bisnis Islam UIN Bandung, 24 September 2020.

- Wawancara, Muhammad Ishom, Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 14 Oktober 2020.
- Wawancara, Zainor Ridho, Dosen Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 14 Oktober 2020 di UIN Banten.
- Webinar Nasional Prodi S-3 UIN Banten: Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Perlu Ditinjau Ulang. (2020, Juli 30). Retrieved from <https://klikanggaran.com/kebijakan/webinar-nasional-prodi-s3-uin-banten-kebijakan-merdeka-belajar-kampus-merdeka-perlu-ditinjau-ulang.html>

Biografi Penulis

Achmad Muchaddam Fahham. Penulis adalah peneliti Agama dan Tradisi Keagamaan di Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Menyelesaikan pendidikan sarjana di Jurusan Peradilan Agama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya pada tahun 1996, S-2 Sejarah Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2002, dan S-3 Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga pada tahun 2013. Beberapa karya tulis ilmiah telah dipublikasikan dalam beberapa buku dan jurnal baik nasional maupun internasional, di antaranya: *Pendidikan Pesantren: Pola Pengasuhan, Pendidikan Karakter dan Perlindungan Anak* (2015), *Pengelolaan Zakat di Indonesia* (2020), “Factors Affecting Customers’ Satisfaction and Loyalty in Sharia Financing for Small and Medium Enterprises” (2020), “Psychological correlates of anti-sexual harassment: dataset of Indonesia's Generation Z” (2020), dan “Factors affecting intention to adopt halal practices: case study of Indonesian small and medium enterprises” (2021). Peneliti dapat dihubungi pada *e-mail* achmad.fahham@dpr.go.id.

Elga Andina. Penulis adalah peneliti Psikologi di Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Menyelesaikan pendidikan sarjana Psikologi Universitas Airlangga, Surabaya pada tahun 2005 dan Pendidikan Profesi Psikologi Industri dan Organisasi Universitas Indonesia pada tahun 2008. Beberapa karya tulis ilmiah telah dipublikasikan dalam beberapa buku dan jurnal, di antaranya: “Budaya Kekerasan Antar-Anak di Sekolah Dasar” (2014), “Melawan Terorisme di Era Digital” (2017), “Layanan Kesehatan Jiwa Dasar di Era Jaminan Kesehatan Nasional” (2017), “Efektivitas Pengukuran Kompetensi Guru” (2018), dan “Problematika Seleksi

dan Rekrutmen Guru Pemerintah di Indonesia” (2021). Peneliti dapat dihubungi pada *e-mail* elga.andina@dpr.go.id.

Fieka Nurul Arifa. Penulis adalah peneliti Studi Pendidikan di Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Menyelesaikan pendidikan sarjana Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Purworejo pada tahun 2011 dan S-2 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2014. Beberapa karya tulis ilmiah yang diterbitkan antara lain: “Pemerataan Kualitas Pendidikan di Daerah Kepulauan” (2018), “Mitigasi Bencana pada Sektor Pendidikan Formal” (2018), “Pencegahan Kekerasan Melalui Pendidikan Karakter” (2019), “Peningkatan Kualitas Hidup Manusia Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Indonesia Pintar (PIP)”, (2019), dan “Peningkatan Kualitas Pendidikan: Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan dalam Pemenuhan Kebutuhan Guru Profesional di Indonesia” (2019). Peneliti dapat dihubungi pada *e-mail* fieka.arifa@dpr.go.id.

Yulia Indahri. Penulis adalah peneliti Pengembangan Budaya Desa dan Kota di Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Menyelesaikan pendidikan sarjana Teknologi Pendidikan IKIP Jakarta pada tahun 1999 dan *Master of Arts University of East Anglia*, Norwich pada tahun 2003. Beberapa karya tulis ilmiah telah dipublikasikan dalam beberapa buku dan jurnal, di antaranya: “Upaya *Asian Parliamentary Assembly* (APA) dalam Penanggulangan Kemiskinan di Asia” (2016), “Permasalahan Organisasi Profesi Guru” (2017), “Penanggulangan Bencana dan Peran Masyarakat” (2017), “Dampak Sosial Pengembangan Pariwisata Indonesia” (2018), dan “Peran Sekolah dan Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah” (2019). Peneliti dapat dihubungi pada *e-mail* yulia.indahri@dpr.go.id.

Biografi Penyunting

Deni Kamaludin Yusup. Penyunting adalah Dosen dan sekaligus Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung. Lulusan S1 Hukum Ekonomi Syariah (1998), S2 Hukum Islam (2001), dan S3 Hukum Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2009). Penyunting pernah mengikuti beberapa program pendidikan dan riset di luar negeri, antara lain: *International Postgraduate Master in Islamic Studies*, Leiden University, Belanda (2003); *International School of Human Rights*, Utrecht University, Belanda (2003), Katholic University of Leuven, Belgium dan Northwestern University California, Amerika (2003); *International Conference*, Aachen, Jerman dan Paris, Perancis (2003); *International Visitor Leadership Program (IVLP)*, Department of State, Amerika (2012); *International Visiting Fellowship Program in Legal Identity and Legal Aid Development Program*, AIPJ-AUSAID, Melbourne, Australia (2013); *International Visiting Research Program in University Legal Clinic Development Program*, Monash University dan University of Melbourne, Australia (2016); dan *International Visiting Research Program at Faculty of Economic and Halal Center*, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand (2019). Selain aktif menjadi dosen, penyunting juga aktif menjadi peneliti, konsultan dan narasumber di beberapa forum ilmiah, serta telah menulis sejumlah karya ilmiah buku ber-ISBN, hasil penelitian ber-HAKI, dan sejumlah artikel yang telah dipublikasikan pada beberapa jurnal nasional dan internasional bereputasi. Karya penyunting dapat dilihat di <https://scholar.google.co.id/citations?user=TrkH1jkAAAAJ&hl=id>, dan penyunting dapat dihubungi pada *e-mail* dkyusup@uinsgd.ac.id.

Indeks

A

adaptif 10, 17
ADB 11
akhlaqul karimah 49
akreditasi PT 3, 7, 74, 76, 81
akselerasi bisnis 54
akuntabilitas 77
Amazon 11
analytical skills 37
anggaran 5
APBN 10
Apple 11
arsitek 17
Asia Pacific Quality Register 14
asisten mengajar 43
asosiasi profesi 15
asuransi kesehatan 40

B

Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi (BAN-PT) 12, 13, 14, 74
Badan Hukum 15, 16
Badan Layanan Umum (BLU)
9, 15, 16, 74, 77, 80, 82
Bank Dunia 11
beban administratif 13
best practice 15
birokrasi 8, 12, 73
BUMD 11
BUMDes 18, 65

BUMN 11, 66

C

Canberra Accord 14
capaian pembelajaran (*learning outcomes*) 2, 8, 28, 33, 40, 41, 43, 47, 54, 56, 67
capaian pembelajaran lulusan (CPL) 28, 30, 31, 32, 33, 42, 56, 57
Cisco Systems 11
coach 40
complex engineering problem definition 41
complex problem solving 37
Consejo Superior de Investigaciones Científicas 80
Council for Higher Education Accreditation 14

D

dalam jaringan (daring) 30, 32, 34, 54, 64, 73
daya serap lulusan 21
Diagnostik 31
digital 9, 17, 56, 57, 71
digital learning 71
dinamika akademik 24
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) 9,

10, 35, 36, 44, 49, 52,
64, 66

Direktorat Pembelajaran
dan Kemahasiswaan
(Belmawa) 67, 68

diseminasi 5

disiplin ilmu 15, 17

disrupsi 2

dokumen kerja sama (MoU/
PKS) 26, 29, 38, 39, 40,
44, 49, 52, 75, 77, 80, 81

dosen pembimbing akademik
(DPA) 30, 33, 34, 39,
43, 47, 52, 54, 58, 64,
70, 71

Dublin Accord 14

dunia kerja 2, 8, 10, 12, 21,
36, 37

E

ekosistem 7, 46

ekuivalensi 56, 57, 64

e-learning 71

embedded 71

era industri 4.0 2

*European Parliamentary Research
Service* 1

*European Quality Assurance
Register for Higher
Education* 14

evaluasi 21, 24, 26, 29, 36, 39,
44, 48, 49, 50, 52, 58, 66,
69, 70

experiential learning 24, 37

F

fakultas 10, 25, 26, 36, 43, 47,
50, 53, 54, 56, 57, 58, 61,
63, 74, 75, 76, 77, 79, 80,
81, 82

finansial 16

fleksibilitas 15, 16

focus group discussion 23, 25

foot soldiers 49

Forum Gerakan Mahasiswa
Mengajar Indonesia
(FGMMI) 44

Forum Rektor Indonesia 72

free form 40, 42, 70, 71

full credit transfer 27

G

Gates Foundation 11

generasi milenial 53

*Global Entrepreneurship Index
(GEI)* 53

globalisasi 1

Gojek 11

good governance 77, 82

Google 11

guru pamong 44, 45

H

hak kekayaan intelektual 48

hard skills 8, 24, 25, 37, 40, 41

honor magang 40

humaniora 4, 18, 21

I*IDN Research Institute* 53

ilmu agama Islam 4, 21

implementasi 4, 5, 23, 24, 25,
26, 49, 71, 72, 73, 77,
79, 80Indeks Desa Membangun
(IDM) 60*Indonesian International
Mobility Students Awards*
(IIMSA) 10

inovasi 2, 7, 8, 9, 48

insinyur 17

institusi pemerintah 18, 37

Intel 11

interaksi sosial 8

J

jejaring kemitraan 25

jurnal 22, 48

KKampus Merdeka 3, 4, 5, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 14, 15, 16,
17, 18, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 46, 53, 60, 63, 71,
72, 73, 74, 76, 77, 79, 80

kapasitas 8, 71

karya tulis ilmiah (KTI) 22

karyawan magang 40

keanekaragaman budaya 27

kegiatan wirausaha 18, 27, 53,
54, 55, 56Kementerian Agama (Kemenag)
4, 21, 22, 32, 72, 74Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan
(Kemendikbud) 2, 3, 4,
7, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 32, 34, 44, 45,
66, 72, 79Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi
(Kemendikbud-Ristek) 2,
3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 21

kepekaan sosial 27, 28, 50

kepribadian 8

KKN daring 73

kolaborasi 8

Komisi X DPR RI 2, 6, 11

konsorsium 32, 35

konversi nilai 29, 38, 45, 51,
55, 59, 65, 69, 70

kreativitas 8, 41

kualitas hidup 1

kualitas pendidikan 42, 44

kualitatif 23

kuliah kerja nyata (KKN)
tematik 27, 60, 61, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69,
70, 71kurikulum 10, 12, 16, 24, 25,
26, 28, 31, 32, 33, 34, 40,
42, 53, 57, 71, 76, 80, 82

L

lapangan kerja 7, 12, 18
 Lembaga Pengelola Dana
 Pendidikan (LPDP) 10
 lembaga riset 18, 46, 47, 49
link and match 2, 8, 11
logbook 39, 43, 47, 49, 52

M

magang/praktik kerja 7, 12, 17,
 18, 27, 36, 37, 38, 39, 40,
 41, 42, 46, 72, 75
 mahasiswa 1, 2, 7, 8, 9, 10, 14,
 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22,
 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75,
 76, 77, 78, 81, 82, 83
 manajemen diri 8
 mentor 39, 40, 52, 54, 55
 merdeka belajar 73
 Merdeka Belajar 3, 5, 7, 25,
 26, 38
 mitra kerja 10, 11
monitoring 15, 39, 44, 50, 52,
 66, 69, 70
 multidisipliner 76, 79, 81

N

Nestlé 11

networking-system 76, 77
new spirit 24
 nomenklatur 10, 74

O

online 17
 organisasi multilateral 11, 18,
 37
 organisasi nirlaba 73
 otonom 7, 8, 15, 73
 otonomi kampus 76
 otonomi PT 76, 77, 81, 82
outbound 35

P

Pangkalan Data Pendidikan
 Tinggi (PD Dikti) 29,
 32, 35, 36, 38, 39, 44, 45,
 49, 51, 52, 55, 59, 65,
 69, 70
 paradigma pembelajaran 2
 paradigma wahyu memandu
 ilmu 46, 49
 PBB 11
 pedoman akademik 30, 33, 34,
 53
 pemodelan 33, 34
 pendidikan berbasis riset dan
 pengembangan (R&D)
 57
 pengabdian kepada masyarakat
 7, 17, 49, 73
 pengakuan SKS 29, 38, 45, 48,
 51, 55, 59, 65, 69, 70
 pengangguran intelektual 53

- penilaian kinerja (*performance assesment*) 37, 43, 47, 50, 56, 59, 61
- penilaian proyek (*project assesment*) 37, 43, 47, 56, 59, 61
- penjaminan mutu 26, 35
- perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN) 4, 5, 21, 22, 23, 74, 76, 77, 79, 80, 81, 82
- perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI) 21, 22, 28
- perguruan tinggi keagamaan Islam swasta (PTKIS) 21
- perguruan tinggi keagamaan (PTK) 22
- perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH) 3, 7, 15, 16, 72, 73, 74, 76, 81
- perguruan tinggi negeri (PTN) 72, 73
- perguruan tinggi (PT) 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 49, 53, 57, 60, 63, 64, 67, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80
- perguruan tinggi swasta (PTS) 72, 73
- Permendikbud 12, 27
- pertukaran pelajar 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35
- perusahaan 11, 17, 18, 36, 37, 38, 73
- perusahaan multinasional 11
- perusahaan rintisan (*startup*) 11, 18, 37
- perusahaan teknologi global 11
- Peta Jalan Pendidikan 2
- pilot project* 49
- politeknik 2, 16
- pool talent* 46
- portofolio 37, 42, 43, 47, 50, 56, 59, 61, 67
- praktik pengalaman lapangan (PPL) 37, 73, 75
- proaktif 79
- prodi 30
- produk industri 33
- profesionalisme 78, 82
- Program 5.000 Doktor 22
- Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) 67, 68
- program Indonesia Mengajar 44
- Program Legislasi Nasional 2020–2024 6
- program sisipan (*sandwich*) 30, 31
- program studi (prodi) 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 43, 47, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 63, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,

- 79, 80, 81, 82
- Program Wirausaha Mahasiswa (PWM) 53
- proposal 18, 36, 50, 51, 53, 54, 55, 58, 59, 61, 65, 68, 69, 70, 71, 73
- proyek independen 7, 17, 19, 57, 58, 59
- proyek kemanusiaan 27, 49, 50, 51, 52
- Psikometri 31
- publikasi 22, 47, 52
- purposive* 23
- pusat inkubasi 54
- R**
- RDPU 2, 85
- regulasi 74, 75
- rekognisi 29, 35, 38, 44, 45, 48, 51, 55, 59, 65
- rekrutmen 37
- rektor 13, 17, 72
- Rencana Operasional (Renop) 24
- Rencana Strategi (Renstra) 24
- research university* 21
- revolusi industri 4.0 1
- Royal Dutch Shell 11
- ruh 24
- rumpun ilmu 4, 17, 21
- RUU Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam 6
- S**
- sarjana 53
- Satuan Kerja (Satker) 15, 16
- Satuan Kredit Semester (SKS) 7, 16, 17, 18, 28, 29, 31, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 67, 69, 70, 75
- satuan pendidikan 7, 17, 27, 42, 43, 44, 45
- SDM unggul 10
- sekolah 18, 42, 44
- Seoul Accord* 14
- sertifikasi industri 3
- Sistem Pendidikan Nasional 6
- skema pembiayaan 32, 34
- SK Rektor 25
- skripsi 41, 47, 64
- SKS pembelajaran 8
- soft skills* 8, 24, 25, 37, 40, 41, 60
- sosialisasi 24, 25, 26, 73
- stakeholders* 25, 60
- standar dosen dan tenaga kependidikan 21, 22
- standar internasional 15
- standar kompetensi lulusan 21
- standar penilaian pendidikan 21
- structured form* 40, 42
- sukarela 13, 14, 16, 74
- sumber daya manusia (SDM) 9, 10, 61, 73, 76, 79, 81
- supervisor 39, 40, 52
- Sydney Accord* 14

T

teaching university 21
 teknologi komputer 1
 tenaga pendidik 76, 79, 81
 Tokopedia 11
 Toyota 11
tracer study 9, 12
training 37
 Traveloka 11

U

*United States Department of
 Education* 14
 Universitas Islam Negeri Sultan
 Maulana Hasanuddin
 Banten (UIN Banten) 5,
 23, 71, 72, 73, 74, 75, 76,
 77, 80, 81
 Universitas Islam Negeri Sunan
 Gunung Djati Bandung
 (UIN Bandung) 5, 23,
 24, 25, 26, 27, 29, 38, 45,
 46, 48, 49, 51, 55, 59, 60,
 65, 68, 69, 70, 71, 76, 77,
 79, 80
 Universitas Islam Negeri (UIN)
 4, 5, 21, 23, 72, 80
 USAID 11

V

vocational university 21
 vokasi 3, 12
voluntary 49

W

Washington Accord 14
*Webometrics Ranking of World
 Universities* 80
 WEF 11
workshop 25
world class university 11
*World Federation of Medical
 Education* 14

Y

yayasan nirlaba 18, 37

Kampus Merdeka di Perguruan Tinggi Islam Negeri

Dalam buku ini disajikan paparan secara komprehensif tentang bagaimana respons PT yang menyambut positif kebijakan penerapan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) melalui studi perbandingan di Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung dan UIN Banten. Buku ini juga telah memaparkan secara sistematis dan lengkap mengenai tahapan-tahapan MBKM di PTKIN, mulai dari penyusunan peraturan universitas dalam bentuk panduan atau petunjuk teknis, peninjauan kurikulum melalui *workshop*, penyusunan rencana pembelajaran, mekanisme/proses pembelajaran dan praktikum, bimbingan dan supervisi, hingga evaluasinya.

Buku yang ada di hadapan pembaca yang budiman ini juga dapat menjadi sebuah “potret” bagi khalayak untuk melihat lebih detail tentang penerapan MBKM di PTKIN. Dalam buku ini terlihat bagaimana upaya PTKIN memberikan “hak belajar tiga semester di luar program studi”, meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian, serta memberikan program-program *experiential learning* dengan jalur yang fleksibel yang diharapkan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya.

PENULIS

- ◆ Achmad Muhaddam Fahham
- ◆ Elga Andina
- ◆ Fieka Nurul Arifa
- ◆ Yulia Indahri

ISBN: 978-623-6716-XX-X



9 786236 716083